

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Dewi Sartika No.47 Kota Palu Telp. (0451) 488152 - 488034 kode pos 94114

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKIP TAHUN 2023

PADA UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/229.1/E-AKIP/PROV/V/2023

TANGGAL : 02 MEI 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Dewi Sartika No.47 Kota Palu Telp. (0451) 488152 - 488034 kode pos 94114

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKIP TAHUN 2023**

**PADA UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 700.1.2.1/229.1/E-AKIP/PROV/V/2023

TANGGAL : 02 MEI 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 PALU
KODE POS 94114 PALU

Palu, 02 Mei 2023

Nomor : LHE-SAKIP/ITDA-SET/VII/2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah
di -
Palu

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 094/116/ITDA tanggal 24 Maret 2023

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan valuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tahun 2022 adalah :

- a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- b. Menilai Tingkat Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- c. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras.
- b. Penilaian pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 menggunakan metodologi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data.
- b. Wawancara
- c. Konfirmasi

5. Kriteria dan Predikat Penilaian

Adapun Predikat Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Predikat	Nilai Angka	Interprestasi Predikat
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

6. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Skor 76,95 dari nilai maksimum 100 atau predikat BB (sangat baik).

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,2	84,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,5	75,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	4,5	50,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	9,75	65,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,1	70,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,5	60,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,5	78,00%
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,5	70,00%
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			76,95	
PREDIKAT			BB	

Berdasarkan presentase capaian sebagaimana tertuang pada table diatas, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1) Perencanaan Kinerja

a) Kualitas Perencanaan Kinerja

- Cascading yang telah disusun sudah menunjukkan adanya upaya perbaikan penyelarasan sasaran yang lebih tinggi kesasaran yang dibawahnya.
- IKU telah memenuhi kriteria SMART, yaitu *Spesifik, Measureable, Achieable, Relevance dan Timebound*.
- IKU telah cukup untuk mengukur kinerja yang seharusnya dan jumlahnya cukup memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya.
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sepenuhnya dapat dicapai (*Achieable*), menantang dan realistis.

b) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja secara optimal sudah dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

2) Pengukuran Kinerja

a) Pemenuhan Pengukuran

Belum tersedianya SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang pengumpulan data kinerja

b) Kualitas Pengukuran

- Belum tersedianya dokumen administrasi terkait keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja
- Belum setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja untuk dibawahnya secara berjenjang.

c) Pemanfaatan Pengukuran

- IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen dan dokumen penganggaran.

- Target kinerja telah dimonitor, namun tidak ada tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.

- Pengukuran kinerja telah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment.

- IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan.

- Belum terdapat tindaklanjut dari hasil pengukuran rencana aksi.

3) Pelaporan Kinerja

a) Penyajian Informasi Kinerja

- Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.

- Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

- Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

- Keandalan data realisasi kinerja masih diperlukan data-data dokumen pendukung atas validasi informasi kinerja.

b) Pemanfaatan Informasi Kinerja

- Pemanfaatan Informasi Kinerja telah dilengkapi dengan informasi yang memadai / belum menyeluruh untuk perbaikan perencanaan,

- Pemanfaatan Informasi Kinerja telah dilengkapi dengan informasi yang memadai / belum menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

- Pemanfaatan Informasi Kinerja telah dilengkapi dengan informasi yang memadai / belum menyeluruh untuk perbaikan kinerja.

- Pemanfaatan Informasi Kinerja telah dilengkapi dengan informasi yang memadai / belum menyeluruh untuk penilaian kinerja.

4) Evaluasi Kinerja

a) Pemenuhan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan atas rencana aksi telah dilakukan namun belum seluruhnya dapat terpenuhi.

b) Kualitas Evaluasi

- Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara triwulan, dan belum sepenuhnya dilakukan dalam mengendalikan kinerja.

- Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara triwulan, dan juga belum adanya alternatif perbaikan yang diberikan.

- Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada namun hasil monitoring atas rencana aksi telah dilakukan dan menunjukkan adanya perbaikan,

c) Pemanfaatan Evaluasi

- Hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimana yang akan datang.

- Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada, namun monitoring atas rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

7. Rekomendasi

Sehubungan belum memadainya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis agar :

1) Pengukuran Kinerja

- Menyusun SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang teknis pengumpulan data kinerja.

- Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja.
- Melakukan pemantauan atas pengukurancapaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- Menyusun data hasil pengukuran kinerja aksi beserta tindaklanjutnya.

2) Pelaporan Kinerja

- Pemanfaatan informasi kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, perbaikan kinerja dan penilaian kinerja

3) Evaluasi Kinerja

- Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.
- Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternative perbaikan.
- Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis.

8. Penutup

Hasil evaluasi beserta rekomendasi yang diberikan telah dibahas dengan pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Berita acara Nomor : **800/01/BAE-AKIP/V/ITDA/2023** tanggal 02 Mei 2023

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat. I (IVb)
Nip. 19721230 200012 1 004